

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis serta pembahasan yang disajikan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. ***Foreign Direct Investment (FDI)* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Local Tax Ratio (LTR)*.**

Hasil ini menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment (FDI)* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Local Tax Ratio* karena sebagian besar pajak yang dihasilkan dari aktivitas investasi asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak tercatat sebagai penerimaan pajak daerah. Selain itu, keterkaitan FDI dengan perekonomian lokal masih terbatas serta didukung oleh berbagai insentif fiskal, sehingga peningkatan arus FDI tidak secara langsung meningkatkan basis pajak daerah.

2. **Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Local Tax Ratio*.**

Peningkatan belanja publik, khususnya pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas basis pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak daerah. Temuan ini mendukung *spend-tax hypothesis*, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak.

3. **Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Local Tax Ratio*.**

Tingginya tingkat inflasi menurunkan daya beli masyarakat dan profitabilitas dunia usaha, sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi basis pajak. Hal ini sejalan dengan *Tanzi-Olivera Effect*, di mana inflasi menyebabkan penurunan nilai riil penerimaan pajak dan memperlemah kinerja fiskal daerah.

4. Korupsi tidak memoderasi pengaruh FDI terhadap *Local Tax Ratio*.

Tingkat korupsi yang tinggi maupun rendah tidak memengaruhi kekuatan hubungan antara FDI dan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena keputusan investasi asing lebih dipengaruhi oleh faktor makro seperti stabilitas politik dan kebijakan nasional, sementara kontribusi pajak FDI pada tingkat lokal bersifat terbatas dan tidak terpengaruh secara langsung oleh perilaku korupsi.

5. Korupsi memperlemah pengaruh Belanja Pemerintah terhadap *Local Tax Ratio*.

Dalam lingkungan dengan tingkat korupsi yang tinggi, efektivitas belanja publik menurun akibat kebocoran anggaran, *mark-up proyek*, serta penyalahgunaan dana publik. Kondisi ini menghambat kemampuan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pajak, sehingga melemahkan dampak positifnya terhadap penerimaan pajak daerah.

6. Korupsi tidak memoderasi pengaruh Inflasi terhadap *Local Tax Ratio*.

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah bersifat langsung dan tidak bergantung pada tingkat korupsi. Korupsi tidak memiliki peran signifikan dalam mengubah mekanisme inflasi terhadap aktivitas ekonomi daerah, karena inflasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan faktor struktural nasional..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah:

- a) Pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus kebijakan dari sekedar menarik investasi menuju penguatan dampak ekonomi lokal yang dapat memperluas basis pajak daerah. Upaya tersebut dapat

dilakukan dengan mendorong keterkaitan FDI dengan UMKM dan rantai pasok lokal, mengoptimalkan pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi seperti pajak jasa dan konsumsi, serta meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan pajak daerah melalui digitalisasi. Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menarik FDI yang padat karya dan berorientasi pasar domestik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar keberadaan FDI dapat memberikan kontribusi fiskal tidak langsung yang lebih optimal.

- b) Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Setiap program belanja, terutama yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal, harus dirancang secara akuntabel dan transparan untuk meminimalkan kebocoran anggaran. Penguatan sistem pengawasan internal, audit independen, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi yang terbukti memperlemah pengaruh belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak daerah.
- c) Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, terutama melalui kebijakan pengawasan distribusi bahan pokok, peningkatan produksi sektor riil, dan kerja sama lintas daerah. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak memoderasi hubungan inflasi dengan local tax ratio, pengendalian inflasi tetap penting karena tekanan inflasi terbukti menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak lokal.

2. Bagi Pemerintah Pusat selaku regulator:

- a) Pemerintah pusat diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan transparansi fiskal, digitalisasi sistem keuangan publik, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan daerah. Penegakan hukum terhadap tindak

pidana korupsi juga perlu diperkuat agar efek jera meningkat dan integritas birokrasi daerah terjaga. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal terhadap peningkatan basis pajak.

- b) Pemerintah pusat diharapkan untuk mengembangkan dan menerapkan standar pengukuran korupsi tingkat daerah yang lebih objektif, komprehensif, dan terstandarisasi secara nasional. Standar ini dapat menggabungkan berbagai indikator kuantitatif (misalnya, kepatuhan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa elektronik/SPSE, tingkat responsifitas layanan publik, rasio audit temuan, kerugian keuangan daerah per kapita) dan kualitatif (survei persepsi pelaku usaha dan masyarakat secara berkala dengan metodologi yang ketat). Pengukuran yang lebih akurat akan memungkinkan evaluasi yang lebih tepat mengenai dampak korupsi pada kinerja fiskal daerah dan efektivitas kebijakan
- c) Pemerintah pusat diharapkan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah dashboard atau indeks korupsi daerah yang bersifat publik dan dinamis. Indeks ini sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dengan mengukur aspek pencegahan, tata kelola, transparansi, dan integritas kelembagaan di setiap daerah. Keterbukaan data akan menjadi bahan analisis yang sangat berharga bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat umum.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, baik dengan menambahkan faktor kelembagaan lain seperti kualitas birokrasi, indeks transparansi fiskal, maupun memperluas periode observasi agar dapat menangkap dinamika ekonomi yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan pendekatan panel data dynamic model atau metode structural equation modeling (SEM) juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme hubungan antara FDI, belanja pemerintah, inflasi, korupsi, dan kinerja pajak daerah.